

**EVALUASI KINERJA TERHADAP IMPLEMENTASI  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DAERAH (RPJMD) PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN  
2017 – 2022**

*PERFORMANCE EVALUATION ON IMPLEMENTATION OF REGIONAL  
MEDIUM TERM DEVELOPMENT PLAN (RPJMD) OF WEST SULAWESI  
PROVINCE 2017 – 2022*

**DEWI KUSUMA NINGRUM**

**P022181045**



**PROGRAM STUDI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**EVALUASI KINERJA TERHADAP IMPLEMENTASI  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DAERAH (RPJMD) PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN  
2017 – 2022**

*Performance Evaluation on Implementation of Regional Medium  
Term Development Plan (RPJMD) of West Sulawesi Province  
2017 – 2022*

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister

Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

Disusun dan diajukan oleh

DEWI KUSUMA NINGRUM

P022181045

kepada

**SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**  
**EVALUASI KINERJA TERHADAP IMPLEMENTASI RENCANA PEMBANGUNAN**  
**JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI SULAWESI BARAT**  
**TAHUN 2017 – 2022**

Disusun dan diajukan oleh

**DEWI KUSUMA NINGRUM**  
**P022181045**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah  
Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin


Pada tanggal 16 Februari 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

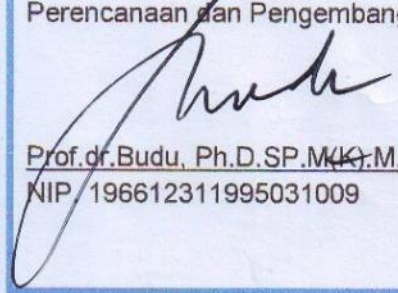
Pembimbing Pendamping

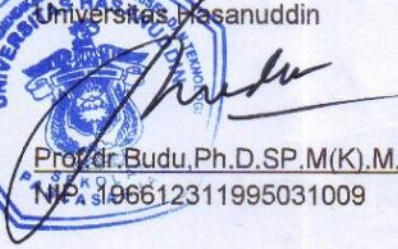
  
Prof. Dr. Ir. Junaedi Muhidong, M.Sc  
NIP. 196001011985031014

  
Dr. Ir. Muh. Hatta Jamil, SP., M.Si.  
NIP. 196712231995121001

Plt. Ketua Program Studi  
Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

Dekan Sekolah Pascasarjana  
Universitas Hasanuddin

  
Prof. dr. Budu, Ph.D.SP.M(K).M.Med Ed  
NIP. 196612311995031009

  
Prof. dr. Budu, Ph.D.SP.M(K).M.Med Ed  
NIP. 196612311995031009



## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa, tesis berjudul "Evaluasi Kinerja terhadap Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022" adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing (Prof. Dr. Ir. Junaedi Muhidong, M.Sc. sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Ir. Muh. Hatta Jamil, SP.,M.Si. sebagai Pembimbing Pendamping). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka tesis ini. Sebagian dari isi tesis ini telah dipublikasikan di Jurnal (International Journal of Innovative Science and Research Technology, Volume 8, Issue 2, Halaman 860-866, dan DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.7677974>) sebagai artikel dengan judul "Infrastructure Capacity Building Program in the Implementation of the Regional Medium – Term Development Plan of West Sulawesi Province 2017 – 2022".

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 16 Februari 2023



Dewi Kusuma Ningrum  
NIM P022181045

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan Judul “Evaluasi Kinerja terhadap Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022”.

Penulis mendapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak selama proses penyelesaian Tesis ini, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar – besarnya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Hasanuddin, Dekan beserta seluruh civitas akademi Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian studi;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Junaedi Muhidong, M.Sc. selaku Ketua dan Bapak Dr. Muh. Hatta Jamil, SP., M.Si. selaku Anggota Komisi Penasehat atas segala bimbingan, arahan dan masukan dalam penyelesaian Tesis ini;
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Hazairin Zubair, MS., Ibu Prof. Dr. Nursini, SE., MA., dan Bapak Dr. Agussalim, SE., M.Si. atas kesediaannya menjadi Panitia Penilai dan memberikan banyak saran serta masukan untuk penyempurnaan Tesis ini;
4. Seluruh Keluarga Besar (Orang tua, Saudara, Anak dan Almarhum suami tercinta) yang telah memberikan dukungan serta doa dari awal proses pendaftaran beasiswa hingga penyelesaian studi;
5. Pusbindiklatren Bappenas selaku pemberi beasiswa pendidikan gelar yang telah memberikan dukungan dan selalu memantau perkembangan studi;
6. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Barat beserta jajaran yang terus menerus memberi motivasi dan dukungan penulis untuk menyelesaikan tesis ini;
7. Seluruh narasumber dan responden yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan jawaban atas setiap pertanyaan dalam penelitian ini;
8. Rekan seangkatan di Prodi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang selalu kebersamai dan memberi dukungan kepada penulis untuk terus semangat menyelesaikan penulisan Tesis ini; serta

9. Pihak – pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut mengantarkan penulis hingga ke tahapan ini.

Akhirnya penulis berharap, Tesis ini dapat bermanfaat bagi perencanaan dan pengembangan wilayah dan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembacanya.

Makassar, 16 Februari 2023

**Dewi Kusuma Ningrum**



## ABSTRAK

Dewi Kusuma Ningrum, 2023. **Evaluasi Kinerja Terhadap Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017- 2022.** (Dibimbing oleh Junaedi Muhidong dan Muh. Hatta Jamil).

Infrastruktur merupakan aspek dasar yang penting untuk mendukung pembangunan daerah. Oleh karena itu, menjadi prioritas yang terwujud dalam berbagai program pada RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017- 2022. Penelitian ini bertujuan menganalisis capaian kinerja program prioritas pada peningkatan kapasitas infrastruktur dalam menunjang perekonomian daerah, mobilitas penduduk, serta permukiman dan perumahan dan menganalisis faktor – faktor yang memengaruhi capaian dari implementasi program – program tersebut. Penelitian merupakan studi evaluasi terhadap data sekunder berdasarkan data target dan indikator kinerja dari 43 program pada RPJMD dan data realisasi berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 – 2021 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2018 – 2021. Instrumen yang digunakan adalah tabel evaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan program yang secara konsisten mencapai hingga melampaui target tahun 2018 – 2020, yaitu Program Pembinaan, Pengembangan, dan Kerjasama Pengawasan Uji Mutu dan Standarisasi Konstruksi Bangunan, Program Perencanaan Tata Ruang, dan Program Pengembangan Pengusahaan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. Sedangkan untuk tahun 2021 yaitu Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) serta Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi. Sedangkan faktor – faktor yang memengaruhi capaian kinerja program antara lain komitmen dan dukungan pimpinan perangkat daerah, pengalokasian anggaran berdasarkan prioritas, kualitas dokumen perencanaan, analisis terhadap kondisi fisik alam, dan efektivitas penyusunan rencana.

Kata Kunci: Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Evaluasi, Infrastruktur, Kinerja Program

## **ABSTRACT**

*Dewi Kusuma Ningrum, 2023. **Performance Evaluation on Implementation of Regional Medium Term Development Plan (RPJMD) of West Sulawesi Province 2017 – 2022.** (Supervised by Junaedi Muhidong dan Muh. Hatta Jamil).*

*Infrastructure is an important basic aspect to support regional development. Therefore, it is a priority that is realized in various programs in the West Sulawesi Province RPJMD 2017-2022. This study aims to analyze the performance achievements of the priority programs on increasing infrastructure capacity in supporting the regional economy, population mobility, as well as settlements and housing and analyze the factors that affect the achievement of the implementation of these programs. This research is an evaluation study of secondary data based on target data and performance indicators from 43 programs in the RPJMD and realization data based on Government Agency Performance Reports (LKjIP) 2018 – 2021 and West Sulawesi Governor Accountability Reports 2018 – 2021. The instruments used are tables evaluation based on Regulation of the Minister of Home Affairs Number 86 of 2017. The results of the study show programs that have consistently achieved and exceeded the 2018 – 2020 target, namely the Development, Development, and Cooperation Program for Supervision of Quality Tests and Standardization of Building Construction, Spatial Planning Programs, and Programs Development of Business and Utilization of New and Renewable Energy and Energy Conservation. Meanwhile, for 2021, the Public Infrastructure, Facilities and Utilities (PSU) Improvement Program and the Transmigration Area Development Program. Meanwhile, the factors influencing the achievement of program performance include the commitment and support of regional apparatus leaders, priority-based budget allocations, quality of planning documents, analysis of natural physical conditions, and effectiveness of planning.*

*Keywords: Mid-Term Development Plan, Evaluation, Infrastructure, Program Performance*



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN TESIS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Kegunaan Penelitian .....	5
1.5 Ruang Lingkup Penelitian .....	5
1.6 Penelitian Sebelumnya .....	6
1.7 Kerangka Konseptual.....	12
<b>BAB II METODE PENELITIAN</b> .....	<b>14</b>
2.1 Pendekatan Penelitian .....	14
2.2 Waktu dan Lokasi Penelitian .....	14
2.3 Metode Pengumpulan Data.....	15
2.4 Metode Analisis Data .....	15
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>22</b>
3.1. Gambaran Umum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022.....	22
3.1.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....	22
3.1.2. Perubahan dalam Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022 .....	25

3.1.3.	Program pada Sasaran Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022.....	27
3.2.	Evaluasi Kinerja RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022... 29	
3.2.1.	Evaluasi Kinerja Program yang Berdampak pada Kondisi Mantap Jalan Provinsi.....	32
3.2.2.	Evaluasi Kinerja Program yang Berdampak pada Persentase Elektrifikasi.....	38
3.2.3.	Evaluasi Kinerja Program yang Berdampak pada Persentase Rumah Layak Huni.....	42
3.3.	Faktor – Faktor yang Memengaruhi Capaian Kinerja Program.....	44
a.	Komitmen dan dukungan pimpinan perangkat daerah.....	45
b.	Pengalokasian anggaran berdasarkan prioritas.....	45
c.	Kualitas dokumen perencanaan.....	45
d.	Analisis terhadap kondisi fisik alam.....	46
e.	Efektivitas penyusunan rencana.....	46
BAB IV KESIMPULAN.....		48
4.1	Kesimpulan.....	48
4.2	Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....		49
Lampiran 1. Hasil evaluasi capaian kinerja RPJMD tahun 2018.....		53
Lampiran 2. Hasil evaluasi capaian kinerja RPJMD tahun 2019.....		63
Lampiran 3. Hasil evaluasi capaian kinerja RPJMD tahun 2020.....		73
Lampiran 4. Hasil evaluasi capaian kinerja RPJMD tahun 2021.....		82

**DAFTAR TABEL**

Nomor urut	Halaman
1. Penelitian terdahulu.....	6
2. Daftar program dan indikator kinerja yang dievaluasi.....	16
3. Evaluasi terhadap hasil RPJMD.....	20
4. Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	20
5. Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran dan program dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022.....	23
6. Daftar Program yang mengalami perubahan pada Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022.....	28
7. Penilaian Kinerja Program Yang Berdampak Pada Kondisi Mantap Jalan Provinsi Tahun 2018 - 2021 .....	32
8. Penilaian Kinerja Program yang Berdampak pada Persentase Elektrifikasi Tahun 2018 - 2021 .....	38
9. Penilaian Kinerja Program Yang Berdampak Pada Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2018 - 2021.....	42

## DAFTAR GAMBAR

Nomor urut	Halaman
1. Kerangka Pikir Penelitian.....	13
2. Target Persentase Kondisi Mantap Jalan Provinsi (a), Target Rasio Elektrifikasi (b), dan target Persentase Rumah Layak Huni (c) pada dokumen RPJMD dan Perubahan RPJMD Prov. Sulbar Tahun 2017 – 2022 .....	27
3. Perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja indikator sasaran peningkatan kapasitas infrastruktur pada RPJMD Prov. Sulbar Tahun 2017 – 2022, (a) Persentase Kondisi Mantap Jalan Provinsi, (b) Persentase Elektrifikasi, dan (c) Persentase Rumah Layak Huni .....	30
4. Perbandingan Jumlah program yang termuat dalam RPJMD, Perubahan RPJMD Prov. Sulbar Tahun 2017 – 2022 dan LKPJ Tahun 2018 – 2022.....	30
5. Persentase Jumlah Program berdasarkan Penilaian Kinerja pada Tahun 2018 – 2021 .....	31
6. Jumlah Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Sulbar (Juta Rupiah) Berdasarkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Tahun 2018 - 2021 .....	34
7. Jumlah Anggaran Dinas Perhubungan Prov. Sulbar (Juta Rupiah) Berdasarkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Tahun 2018 - 2021 .	37
8. Jumlah Anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulbar (Juta Rupiah) Berdasarkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Tahun 2018 - 2021 .....	40
9. Jumlah Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sulbar (Juta Rupiah) Berdasarkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Tahun 2018 - 2021 .....	44

## DAFTAR SINGKATAN

<b>Singkatan</b>	<b>Arti dan Penjelasan</b>
Pemprov	Pemerintah Provinsi
Sulbar	Sulawesi Barat
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Renstra	Rencana Strategis
Renja	Rencana Kerja
LKPJ	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
LKjIP	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
APBD	Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah
RAPBD	Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Perda	Peraturan Daerah
Permendagri	Peraturan Menteri Dalam Negeri
PUPR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Infrastruktur adalah sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, listrik, pengairan, pembuangan limbah, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik sosial maupun ekonomi (Suraharta, 2021; Syadullah & Setyawan, 2021). Itu dibangun untuk meningkatkan kesejahteraan yang disesuaikan dengan kebijakan dan kebutuhan setiap daerah (Syadullah & Setyawan, 2021). Selain itu, dianggap penting untuk menopang kapasitas ekonomi dan berdampak langsung terhadap sumber daya manusia, inklusi sosial, pembangunan bangsa dan negara serta kelestarian lingkungan (Desalegn & Solomon, 2022). Oleh karena itu, infrastruktur menjadi salah satu penentu penting kondisi kehidupan penduduk.

Dengan karakteristik geografis Indonesia yang beragam, Infrastruktur menjadi sektor penting, terutama untuk menghubungkan antar daerah dan menggerakkan perekonomian (Sumardjoko & Akhmadi, 2019). Kurangnya akses infrastruktur diklaim sebagai penyebab utama kesenjangan pendapatan yang besar di Indonesia (Nurdina, 2021). Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur dijadikan salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah (Ajawaila et al., 2021). Namun, perencanaan dan pelaksanaan proyek yang tidak tepat dapat berdampak negatif pada ekonomi dan lingkungan kawasan. Bahkan dalam beberapa kasus, investasi infrastruktur dapat menimbulkan ancaman bagi masyarakat yang akan terkena dampaknya secara langsung (Prus & Sikora, 2021).

Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi strategis untuk mendukung konektivitas wilayah. Letaknya berada di antara Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Timur. Selain menjadi Jalur Lintas Sulawesi, provinsi ini pun berpotensi sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sedang dibangun di Kalimantan Timur. Namun, potensi ini belum didukung oleh infrastruktur yang memadai. Salah satu yang paling variabel fisik yang paling terlihat adalah kondisi jalan.

Kondisi Mantap Jalan menjadi salah satu indikator dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Menurut Badan Pusat Statistik, “Kondisi mantap jalan merupakan proporsi dari panjang jalan yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang terhadap total Panjang jalan.” Dimana kategori mantap ini diberikan untuk jalan dengan permukaan yang rata dan memadai untuk dilalui kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman, dengan angka Roughness Indeks IRI di bawah 4 untuk kondisi baik, dan di bawah 8 untuk kondisi sedang (*Kondisi Mantap Jalan Nasional (Persen)*, n.d.).

Dalam RPJMD 2017 – 2022, digambarkan bahwa jalan provinsi sepanjang 349,67 km, yang memiliki kondisi mantap baru sebesar 20,03 % di tahun 2016. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2011 yang hanya 13,32 % (Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 - 2022, 2017). Menurut data Badan Pusat Statistik (2023), jalan berkondisi baik dan sedang di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2022 mencapai 57.31%. Sedangkan untuk permukaan aspal hanya sepanjang 24.48% dari 5.061,9 km panjang jalan di provinsi Sulawesi barat. Bahkan infrastruktur jalan ini sering kali terhambat akibat terjadi longsor yang menimbun badan jalan. Tentunya berdampak besar bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Besarnya dampak dari kapasitas infrastruktur di Provinsi Sulawesi Barat menjadi salah satu prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menetapkan “*Meningkatkan kapasitas infrastruktur dalam menunjang perekonomian daerah, mobilitas penduduk, serta permukiman dan perumahan*” sebagai sasaran ke-tiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017 – 2022. Sasaran ini dicapai melalui berbagai program dan kegiatan Pemerintah Daerah dalam kurun waktu lima tahun.

Dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Menurut Khan (2016), setiap kebijakan publik harus diimplementasikan dan kesuksesannya tergantung pada keberhasilan penerapan kebijakan tersebut. Implementasi merupakan tahap penting dari proses



pembuatan kebijakan. Selain itu, dapat dipandang sebagai proses, output dan hasil, pelibatan sejumlah aktor, organisasi dan teknik kontrol. Organisasi publik, baik berupa Lembaga, departemen, biro, otoritas, maupun sejenisnya merupakan inti dari aparat pelaku implementasi kebijakan (O'Toole & Meier, 2011). Demikian pula dengan RPJMD Prov. Sulbar yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah (Perda) sebagai panduan kerja Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.

Untuk melihat sejauh mana keberhasilan program, maka dilakukan evaluasi terhadap capaian RPJMD selama ini. Evaluasi merupakan salah satu langkah menilai keberhasilan, keterbatasan bahkan kegagalan dari suatu program dengan memberikan gambaran mengenai kemajuannya dalam mencapai tujuan (Martin, 2015), kebijakan dan program pemerintah (Guyadeen & Seasons, 2016). Hal ini telah sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004, dimana evaluasi sebagai bagian perencanaan pembangunan yang dilakukan untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan.(Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 2004).

Evaluasi ini menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh masing – masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selanjutnya hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan untuk periode berikutnya. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran, hasil, dampak (Leeuw, 2009). Oleh karena itu, pemanfaatan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui pemenuhan prinsip ekonomi, efisiensi dan efektivitas dari suatu organisasi, aktivitas atau program. (Mahmudi, 2013)

Kinerja merupakan suatu konsep multidimensional yang mencakup banyak faktor yang memengaruhinya (Mahmudi, 2013). Faktor keberhasilan didefinisikan sebagai komponen dasar yang dapat dikontrol dari pekerjaan dalam suatu proyek atau proses manajemen, sehingga meningkatkan peluang untuk mencapai hasil yang sukses (Siddique, 2016). Untuk itu, mengetahui faktor – faktor yang memengaruhi capaian kinerja dalam implementasi RPJMD ini dapat membantu untuk mengendalikan hal – hal yang dapat diantisipasi di periode mendatang.

Adapun beberapa faktor yang umumnya berpengaruh terhadap kinerja program dan kinerja organisasi, antara lain (1) Kepemimpinan, terutama dalam

bentuk dukungan dan komitmen dalam mengimplementasikan rencana strategis organisasi (Lo et al., 2016; Setiowati, 2018); (2) Perencanaan strategis (Elbanna et al., 2016; Siddique, 2016) yang konsisten akan memengaruhi efektivitas dan efisiensi dari program pembangunan daerah (Wijaya, 2018); (3) Sumber daya manusia mencakup jumlah staf yang tepat dengan keterampilan yang memadai menentukan keberhasilan program (Siddique, 2016); (4) Lingkungan kerja, baik berupa aspek fisik maupun non fisik yang berada di sekitar pegawai (Purnami & Utama, 2019); (5) Budaya organisasi dapat menciptakan motivasi bagi pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya (Gunawan, 2020; Ha, 2020; Mekka et al., 2020); dan (6) Penganggaran yang konsisten, efektif dan efisien (Hutama & Yudianto, 2019; Wijaya, 2018).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana hasil evaluasi capaian program prioritas yang mendukung sasaran “Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur dalam Menunjang Perekonomian Daerah, Mobilitas Penduduk, serta Permukiman dan Perumahan” dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022?
2. Faktor apa yang memengaruhi capaian dari implementasi program yang mendukung sasaran “Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur dalam Menunjang Perekonomian Daerah, Mobilitas Penduduk, serta Permukiman dan Perumahan” dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk menganalisis capaian kinerja program prioritas yang mendukung sasaran “Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur dalam Menunjang Perekonomian Daerah, Mobilitas Penduduk, serta Permukiman dan Perumahan” dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022.
2. Untuk menganalisis faktor – faktor yang memengaruhi capaian dari implementasi program yang mendukung sasaran “Meningkatnya Kapasitas

Infrastruktur dalam Menunjang Perekonomian Daerah, Mobilitas Penduduk, serta Permukiman dan Perumahan” dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan tidak hanya sebagai hasil akhir dari penyelesaian studi, tetapi dapat bermanfaat secara luas, bagi pemerintah dan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat dan para peneliti selanjutnya. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diberikan dari penelitian ini, antara lain :

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pembangunan daerah sehingga program dan kegiatan pemerintah dapat tepat sasaran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kekurangan yang ada dalam proses perencanaan sehingga dapat meningkatkan kualitas dokumen dan sistem yang ada saat ini;
3. Menjadi pengembangan dari penelitian sebelumnya dan dapat dijadikan referensi tambahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan ke depannya.

#### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini merupakan studi evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022. Dokumen ini merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah yang kemudian diuraikan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta dihubungkan dengan program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Untuk mengukur kemajuan yang telah dicapai atas implementasi kebijakan tersebut, maka digunakanlah indikator kinerja sebagai tolak ukur atas setiap program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Peneliti menyadari kompleksitas yang ada pada dokumen tersebut dan keterbatasan yang dimiliki, maka dilakukan pembatasan fokus penelitian, yaitu hanya pada capaian kinerja program – program prioritas pada sasaran pertama di misi ke-tiga pembangunan daerah. Adapun sasaran yang dimaksud adalah

“Meningkatnya kapasitas infrastruktur dalam menunjang perekonomian daerah, mobilitas penduduk, serta pemukiman dan perumahan”. Itu merupakan sasaran pada misi ke-tiga, “Membangun dan Memperkuat Konektivitas antar Wilayah Berbasis Unggulan Strategis”. Penentuan fokus penelitian ini didasari pemikiran bahwa infrastruktur merupakan pelayanan dasar yang sangat penting untuk mendukung berbagai aspek di suatu wilayah. Apalagi Sulawesi Barat merupakan akses utama jalur darat karena dilalui oleh jalan poros lintas provinsi yang menghubungkan wilayah utara dan selatan.

## 1.6 Penelitian Sebelumnya

Topik bahasan dalam penelitian ini bukanlah hal yang baru. Terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan dan relevan dengan tema evaluasi implementasi program dan kebijakan serta faktor – faktor yang memengaruhi kinerja. Adapun penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Penelitian terdahulu

No.	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	<i>Critical Success Factors, government policy compliance and completion of construction projects in public secondary schools in Bungoma County, Kenya.</i> (Ojiambo, 2018)	Penelitian dimaksudkan untuk menguji pengaruh faktor penentu keberhasilan proyek, kebijakan pemerintah dan penyelesaian proyek konstruksi di Sekolah Menengah Negeri di Kabupaten Bungoma, Kenya.	Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran : pendekatan kualitatif dan kuantitatif termasuk pengujian hipotesis.  Populasi target penelitian sebanyak 610 terdiri dari kepala sekolah, Ketua PTA, dan Petugas Jaminan Kualitas, dari mana ukuran sampel 461 diambil. Data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensial dan data disajikan dalam tabel frekuensi sedangkan data kualitatif disajikan dalam bentuk naratif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik proyek, atribut manajer proyek, dukungan manajemen puncak, ketersediaan sumber daya dan faktor sosial ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap penyelesaian proyek konstruksi. Selain itu, kepatuhan kebijakan pemerintah memiliki pengaruh moderat yang signifikan secara statistik pada faktor-faktor keberhasilan kritis dan penyelesaian proyek konstruksi di sekolah menengah negeri di Kabupaten Bungoma (pengadaan dan penggunaan dan audit proyek sekolah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 52,8% penyelesaian proyek konstruksi dikaitkan dengan faktor-faktor keberhasilan kritis gabungan. Pentingnya setiap faktor penentu keberhasilan adalah kunci untuk menjamin keberhasilan penyelesaian proyek konstruksi.
2.	<i>Analisis Pengaruh</i>	Menganalisis pengaruh	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan metode kuantitatif, dengan</li> </ul>	Hasil penelitian menunjukkan variabel konsistensi perencanaan

No.	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	<i>Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran terhadap Efektivitas dan Efisiensi Program Pembangunan Daerah</i> (Wijaya, 2018)	konsistensi perencanaan dan penganggaran terhadap efektivitas dan efisiensi program pembangunan daerah di Bappeda Provinsi Sulawesi Barat dalam periode 2012 – 2016	<p>instrumen: Matriks konsolidasi perencanaan dan penganggaran; metode evaluasi kinerja pelaksanaan belanja; dan regresi data panel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel terikat: efektivitas dan efisiensi program pembangunan daerah. Sedangkan variabel bebas: konsistensi perencanaan, konsistensi penganggaran, dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.</li> <li>• Data sekunder: dokumen renja, RKPD, PPAS, APBD dan LKPJ.</li> </ul>	berpengaruh positif terhadap efektivitas dan efisiensi program pembangunan daerah sebesar 0.349742. Demikian juga dengan variabel konsistensi penganggaran yang memberikan pengaruh positif sebesar 0,519721. Sebaliknya, variabel sinkronisasi perencanaan dan penganggaran tidak berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi program pembangunan daerah.
3.	<i>Assessing the Capability of Project Management Practice on Infrastructure Projects in Northern Nigeria</i> (Shuaib & Davison, 2018)	Untuk menentukan keberadaan relatif faktor-faktor dalam praktek manajemen proyek dari perspektif klien, konsultan dan kontraktor dengan tujuan untuk menetapkan kepentingan relatif mereka dalam keberhasilan proyek infrastruktur di Nigeria.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Survei kuantitatif menggunakan kuesioner online pada 200 profesional pada 40 proyek di Nigeria.</li> <li>• 21 faktor yang diperoleh dari literatur, kemudian dipangkas menjadi 14 setelah uji coba validitas kuesioner.</li> <li>• Koefisien korelasi peringkat Spearman digunakan untuk menguji kesamaan atau ketidaksamaan dalam peringkat faktor di antara responden.</li> </ul>	<p>Temuan studi ini menunjukkan "kurangnya bentuk kondisi kontrak yang menguntungkan", "hubungan pemangku kepentingan yang lemah" dan "potensi kepemimpinan yang buruk" sebagai faktor utama yang menyebabkan praktik PM yang tidak sehat di Nigeria.</p> <p>Studi ini merekomendasikan kerangka kerja berbasis hubungan untuk praktik PM yang akan mencerminkan masalah yang berkaitan dengan tim proyek dan hubungan lintas fungsi dan kerja mereka dalam pengiriman proyek.</p>
4.	<i>Institutional Factors Influencing Implementation of Infrastructure Projects by County Governments in Kenya: A Case of Embu County, Kenya</i> (Musyoki & Gakuu, 2018)	Studi ini berusaha untuk memeriksa faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penyelesaian proyek yang didanai kabupaten di Embu County, Kenya. Dengan menguji pengaruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur, memeriksa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desain penelitian deskriptif digunakan untuk mensurvei target 100 responden dengan kuesioner dengan pertanyaan terstruktur dan tidak terstruktur.</li> <li>• Analisis menggunakan perangkat lunak SPSS dengan model regresi.</li> </ul>	<p>Temuan mengungkapkan bahwa pemangku kepentingan secara negatif dan signifikan memengaruhi pelaksanaan proyek infrastruktur oleh pemerintah daerah di Kenya, Studi ini juga menemukan bahwa manajemen, sumber daya organisasi dan tata kelola secara positif dan signifikan memengaruhi pelaksanaan proyek infrastruktur oleh pemerintah daerah. Studi ini menyimpulkan bahwa para pemangku kepentingan, manajemen, sumber daya organisasi dan tata kelola</p>

No.	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		bagaimana manajemen memengaruhi implementasi proyek infrastruktur, menguji pengaruh sumber daya dalam pelaksanaan proyek dan memeriksa bagaimana tata kelola memengaruhi implementasi proyek infrastruktur.		secara signifikan memengaruhi implementasi proyek infrastruktur.
5.	Analisis Evaluasi Kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 – 2017 (Saleh & Syafrudin, 2018)	Mengetahui hasil pembangunan daerah berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dan tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 – 2017.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan analisis deskriptif kuantitatif</li> </ul>	Hasil penelitian menunjukkan Capaian Kinerja Utama (a). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2013-2016 baru mencapai rata-rata sebesar 4,66%. (b). PDRB per kapita pencapaiannya melampaui targetnya. (c). Pertumbuhan sektor industri, tidak tercapai. (d). Target RPJMD khusus jasa perdagangan belum tercapai. (e). Pertumbuhan sektor pertanian, realisasi rata-rata pertumbuhann pada periode 2012- 2016 adalah sebesar 1,26%, Tetapi dalam RPJMD tidak terukur. (f). Indeks pembagunan manusia (IPM) belum mencapai target. (g). Angka harapan hidup (AHH) tercapai sebesar 100,82%. (h). Rata- rata lama sekolah daerah Barito Kuala dibawah rata- rata Provinsi. (i). Angka harapan lama sekolah (HLS) daerah Barito Kuala dibawah rata- rata Provinsi. (j). Tingkat kemiskinan, realisasinya pada tahun 2016 sebesar 4,75%, Jika dibandingkan dengan target RPJMD pada akhir tahun masa jabatan Bupati sebesar 4,85%. (k).Tingkat kepuasan masyarakat tidak terukur. (l). Akuntabilitas kinerja, realisasi indikator nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2016 nilainya BB (70-80). Jika dibandingkan dengan target RPJMD pada akhir tahun masa jabatan Bupati nilainya BB.(m). Opini BPK realisasinya pada tahun 2015 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
6.	<i>The Influence of Budget Participation, Budget Goals Clarity and</i>	Memeriksa pengaruh dari partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran	Menggunakan instrumen kuesioner. Menggunakan <i>path analysis</i> (analisis jalur).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran dan implementasi sistem pengendalian intern secara simultan memiliki

No.	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	<i>Internal Control System Implementation on Local Government Performance</i> (Hutama & Yudianto, 2019)	dan implementasi sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah.		pengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang dengan kontribusi pengaruh yaitu sebesar 73,4%. Secara parsial, partisipasi anggaran berpengaruh positif dengan kontribusi pengaruh 24,3%, kejelasan tujuan anggaran berpengaruh positif terhadap kontribusi pengaruh 20,3%, dan implementasi sistem kontrol berpengaruh positif terhadap kontribusi pengaruh 28,8. % pada Pemerintah Kabupaten Karawang.
7.	<i>Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu</i> (Roehaenah, 2019)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran, yakni muatan dan substansi RKPD dan APBD Kabupaten Indramayu Tahun 2016 dari sisi keselarasan program, kegiatan, dan anggaran serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tinggi dan rendahnya konsistensi antar dokumen- dokumen tersebut.	Metode kualitatif deskriptif, Menggunakan indikator Willian N. Dunn	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dengan indikator William N. Dunn, indikator ketepatan paling berhasil digunakan dalam mengukur besaran tingkat konsistensi. Sedangkan indikator pemerataan sangat sulit diukur keberhasilannya.</li> <li>• Dari sisi perhitungan indikator output kegiatan memang dapat dihitung besaran capaiannya. Namun dari pencapaian outcome belum dapat dihitung atau diukur.</li> <li>• Untuk penilaian konsistensi terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan ditemukan ketidaksesuaian antara RKPD dan APBD, baik pagu, jumlah program dan kegiatan.</li> <li>• Ketidakkonsistenan pada dokumen perencanaan disebabkan oleh: adanya kegiatan yang bersumber dana non-APBD setelah penyusunan RKPD; adanya kebijakan pemerintah pusat tentang prosedur pelaksanaan program; ketidakmatangan dalam menyusun PPAS; ketidaktahuan staf perencana Dinas terhadap proses perencanaan daerah; dan adanya tekanan politis untuk mengadakan suatu kegiatan.</li> </ul>
8.	<i>Efektivitas Perencanaan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Tapanuli Tengah</i> (Sianipar, 2019)	Untuk mengetahui proses perencanaan pembangunan pariwisata dan efektivitas perencanaan pembangunan pariwisata di	Metode kualitatif deskriptif: wawancara, observasi serta dokumentasi	Perencanaan pembangunan pariwisata di Kabupaten Tapanuli tengah belum efektif, karena beberapa program yang belum tepat sasaran sesuai dengan potensi wisata yang dimiliki. Hasil monitoring dan evaluasi tidak dijadikan sebagai suatu pedoman dalam menentukan program



No.	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Kabupaten Tapanuli Tengah		kegiatan pembangunan pariwisata untuk tahun berikutnya.
9.	<i>Factors Influencing Implementation of Water Infrastructure Projects: A Case of Lapsset Authority, Kenya</i> (Kaburu, 2019)	Untuk menilai faktor – faktor yang memengaruhi implementasi proyek – proyek infrastruktur air dalam kasus LAPSSET Authority, Kenya.	<p>Penelitian mengadopsi desain penelitian deskriptif.</p> <p>Menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data primer di tempat kerja responden.</p> <p>Data diorganisasikan terutama dengan menggunakan statistik inferensial dan deskriptif. Analisis korelasi mengukur kekuatan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen</p>	<p>Dari temuan, lingkungan proyek, keterlibatan pemangku kepentingan, kelayakan finansial dan prosedur hukum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi proyek infrastruktur air dalam kasus LAPSSET Authority, Kenya. Studi ini menyimpulkan bahwa proyek diaudit setiap tahun, catatan keuangan disiapkan tepat waktu dan anggaran berkala digunakan untuk pelaksanaan proyek. Otoritas LAPSSET memperoleh izin sebelum pelaksanaan proyek, mengikuti kebijakan pendanaan yang diberlakukan oleh pemerintah dan mendapatkan persetujuan lisensi sebelum melaksanakan proyek. LAPSSET telah membangun kepercayaan dengan para pemangku kepentingannya dan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan. Otoritas LAPSSET memungkinkan anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam konsepsi dan desain proyek dan anggota masyarakat memberikan kontribusi uang tunai untuk pelaksanaan proyek. Lingkungan proyek LAPSSET membuat implementasi proyek menjadi sukses dan lebih cepat, lingkungan proyek membuatnya mudah digunakan untuk mengikuti kebijakan yang terlibat dalam implementasi proyek.</p>
10.	<i>Evaluasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara</i> (Ajawaila et al., 2021)	Untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara	Menggunakan metode kualitatif, dengan mengumpulkan data melalui observasi dan pencatatan secara tersusun dan sistematis serta wawancara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator input berupa sumber daya pendukung dan bahan-bahan yang dibutuhkan cukup memadai.</li> <li>• Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kec. Tobelo terbagi dalam beberapa program pembangunan yang dibedakan berdasarkan pelaksana dan sumber penganggarnya.</li> <li>• Kendala yang sering terjadi dalam pelaksanaan pembangunan adalah proses pengurusan tanah untuk pembangunan karena dilakukan di atas tanah milik masyarakat.</li> </ul>

No.	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan infrastruktur sangat memberi dampak positif, terutama bagi perekonomian masyarakat.</li> </ul>
11.	<i>Analisis Penyusunan Rencana dan Pencapaian Target RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018</i> (Noor & Jayus, 2021)	Mendeskripsikan dan menganalisis pola penyusunan rencana RPJMD Provinsi Jawa Tengah; dan mendeskripsikan dan menganalisis pencapaian target RPJMD dan Renstra OPD serta indikator RKPD dan Renja OPD di Provinsi Jawa Tengah	Menggunakan pendekatan fenomenologis dengan mendeskripsikan peristiwa sosial masyarakat untuk mengungkapkan peristiwa riil di lapangan dan mengungkapkan nilai yang tersembunyi. Metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi pada Bappeda, Dinas Pendidikan dan Dinas Bina Marga.	Pola penyusunan RPJMD sudah mengacu pada tata cara penyusunan RPJMD (PP 08/2008 dan Permendagri 54/2010) dan sudah memuat tema-tema penting yang terkait dengan isu – isu strategis yaitu kemiskinan, pengangguran, tetapi belum sepenuhnya selaras dengan RPJPD, SDG's dan Dokumen RPJMD Teknokratik. Sedangkan upaya untuk mencapai target kinerja RPJMD sudah dilakukan walaupun telah terjadi perubahan indikator dikarenakan adanya program unggulan di luar indikator belum diatur dalam Permendagri Nomor 54/2010 sebagai peraturan pelaksanaan dari PP Nomor 8/2008.
12.	<i>Evaluasi Perencanaan Pembangunan Wilayah Kepulauan Riau Tahun 2019</i> (Naharuddin, 2022)	Menganalisa proses perencanaan pembangunan wilayah dan faktor – faktor yang menyebabkan belum optimalnya perencanaan pembangunan wilayah Kepulauan Riau tahun 2019.	Proses perencanaan pembangunan dianalisa dan dideskripsikan menggunakan tiga indikator dalam teori evaluasi perencanaan pembangunan William N. Dunn, yakni: (1) Efisiensi; (2) Perataan; dan (3) Responsiitas. Metode penelitian digunakan adalah metode penelitian kualitatif.	Walaupun proses perencanaan pembangunan yang dimulai dari pentahapan dan penjadwalan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2019 telah sesuai dan partisipasi Stakeholder dalam Musrenbang juga cukup baik, namun capaian kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Daerah pada akhir tahun ditemukan 25% target kinerja yang belum tercapai. Pendekatan yang dilakukan dalam proses perencanaan pembangunan juga masih menggunakan kaidah normatif, yaitu berorientasi pada perencanaan pembangunan berbasis wilayah daratan (continental approach) yang seharusnya menggunakan pendekatan berbasis wilayah kepulauan (ocean approach).
13.	<i>Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2016 – 2021 untuk Penanganan Banjir oleh Pemerintah</i>	Evaluasi kebijakan pemerintah dalam implementasi program dan kegiatan untuk mengurangi risiko banjir dari tahun 2016 – 2021	Evaluasi kebijakan menggunakan 3 parameter gabungan dari William Dunn dan Bappenas yaitu relevansi, efektivitas dan dampak. Data yang digunakan adalah dokumen RPJMD Kab. Kendal Tahun	Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan kurang efektif, kurang berdampak dan tidak tepat sasaran untuk mengurangi risiko banjir di Kabupaten Kendal. Dari 11 kegiatan hanya 1 kegiatan yang memenuhi kriteria evaluasi,

No.	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	<i>Daerah di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah (Pambudi &amp; Sunarharum, 2023)</i>		2016 – 2021, dokumen Renstra dinas terkait dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dinas terkait tahun 2016 – 2021 yang dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk kualitatif naratif.	hal tersebut dikarenakan kurangnya koordinasi antara Dinas yang bersangkutan, kekurangan dana dan implementasi kegiatan yang terbatas pada lokasi tertentu sehingga mengakibatkan pencapaian tujuan tidak tercapai.

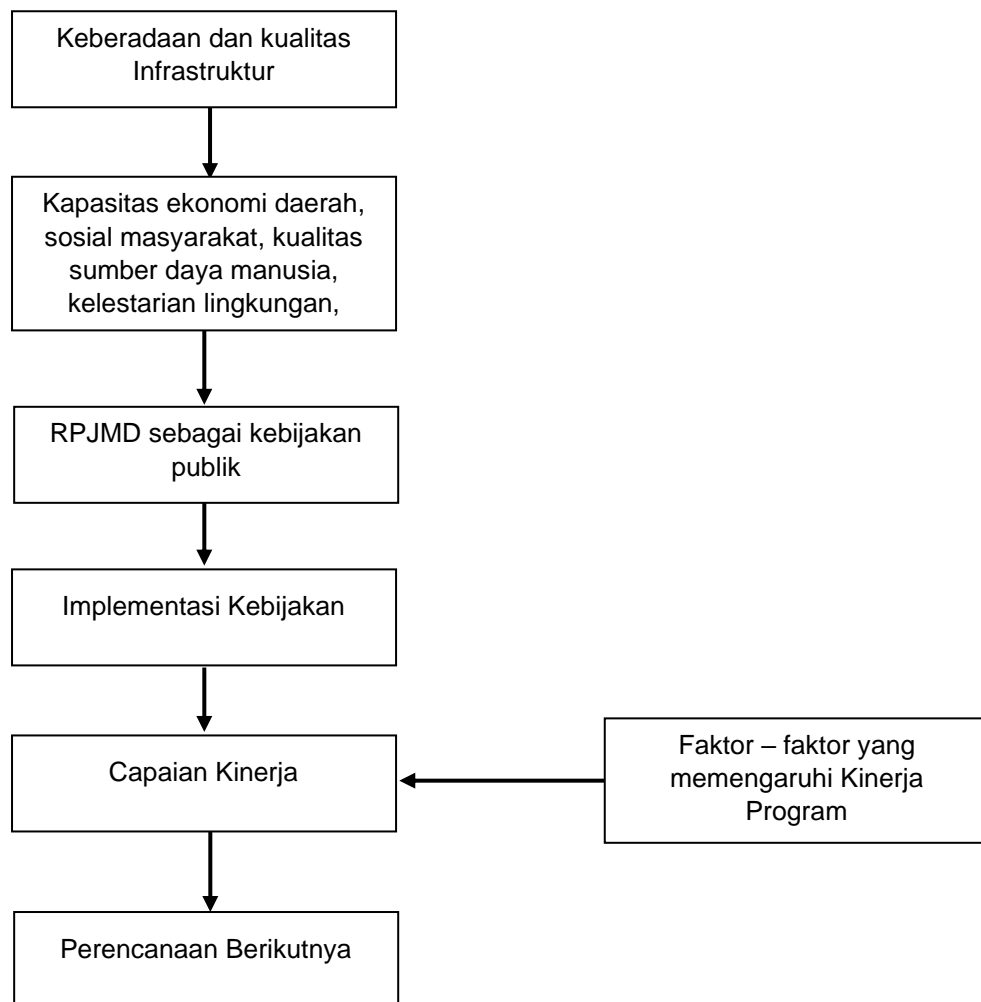
Selain perbedaan lokasi dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini pun memiliki tujuan yang berbeda. Evaluasi kinerja dalam penelitian ini dilakukan terhadap program – program yang berkaitan dengan sasaran peningkatan kapasitas infrastruktur dalam menunjang perekonomian daerah, mobilitas penduduk serta permukiman dan perumahan yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022. Adapun acuan dalam penelitian ini adalah aturan terbaru yaitu Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Selanjutnya peneliti mengkaji dan menganalisis faktor – faktor yang memengaruhi capaian dari implementasi program – program tersebut. Kemudian hasilnya dapat dipertimbangkan oleh pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan selanjutnya.

## 1.7 Kerangka Konseptual

Infrastruktur adalah sistem layanan fisik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik sosial maupun ekonomi. Peranannya penting untuk meningkatkan kesejahteraan daerah, karena berdampak langsung untuk menopang kapasitas ekonomi, sumber daya manusia, inklusi sosial, dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan proyek yang tidak tepat akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Dengan besarnya dampak yang diberikan, infrastruktur menjadi aspek prioritas dalam kebijakan publik, seperti RPJMD Prov. Sulbar Tahun 2017 – 2022. Tentunya kebijakan tersebut haruslah diimplementasikan dengan baik agar dapat mendukung visi dan misi pembangunan daerah. Pencapaiannya menjadi indikator keberhasilan pembangunan dan pemerintah daerah sebagai aktor dalam tahapan implementasi. Namun, ini hanya dapat dilihat melalui tahapan evaluasi atas

rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan berikutnya. Selain hasil evaluasi yang didapatkan, juga penting untuk mengidentifikasi faktor – faktor mempengaruhinya. Faktor keberhasilan didefinisikan sebagai komponen dasar yang dapat dikontrol dari pekerjaan dalam suatu proyek atau proses manajemen, sehingga meningkatkan peluang untuk mencapai hasil yang sukses.



**Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian**

## **BAB II**

### **METODE PENELITIAN**

#### **2.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan studi evaluasi terhadap data sekunder berupa dokumen perencanaan dan pelaporan serta kebijakan peraturan terkait dengan implementasi perencanaan pembangunan daerah. Sugiyono (2018: 3) mengemukakan penelitian evaluasi adalah evaluasi program yang merupakan metode ilmiah yang digunakan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi suatu program, kebijakan, proyek dan aktivitas tertentu baik yang telah lalu, yang sedang terjadi, maupun usulan program yang akan datang. Penelitian evaluasi dilakukan berdasarkan pada standar rencana dan tujuan dari suatu program. Hasil dari penelitian evaluasi akan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas perumusan, implementasi dan hasil dari suatu proyek, kebijakan dan program.

Kegiatan dalam penelitian evaluasi adalah membandingkan antara kegiatan yang direncanakan dengan kegiatan yang dilaksanakan, dan membandingkan tujuan program dengan hasil yang dicapai. Dengan begitu, akan diperoleh informasi seberapa jauh perencanaan dapat dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan tercapai, sehingga dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan suatu program (Sugiyono, 2018: 5).

#### **2.2 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Rancangan penelitian telah disusun sejak tahun 2021, yang diawali dengan pra penelitian untuk mendapatkan informasi dasar mengenai rencana target pembangunan lima tahunan. Kemudian pada bulan Mei 2022 mulai dilakukan pengumpulan data – data yang dibutuhkan hingga bulan September 2022.

Penelitian ini dilaksanakan pada instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Data berupa dokumen rencana dan laporan diperoleh dari perangkat daerah terkait, yaitu Bappeda Prov. Sulbar, Biro Organisasi dan Biro Pemerintahan dan Kesra Prov. Sulbar.

### **2.3 Metode Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan melalui studi pustaka yang dilakukan dengan cara mengaji sumber tertulis seperti dokumen, laporan tahunan dan peraturan perundang-undangan. Kajian dokumen merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi dari berbagai dokumen tertulis (Nilamsari, 2014).

Demi menjamin kredibilitas data yang tinggi, maka penelitian ini memanfaatkan data target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022; Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 – 2021; Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022; dan data realisasi kinerja berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2018 – 2021; dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Sulawesi Barat. Sumber data diperoleh dari Bappeda, Biro Organisasi dan Biro Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat.

Adanya dinamika birokrasi yang selalu berubah menjadi kendala bagi peneliti untuk menemukan narasumber yang tepat dengan pengetahuan mengenai proses implementasi program sejak awal hingga akhir periode. Metode Studi Pustaka ini dianggap tepat untuk menemukan data dan informasi yang detail secara valid dari berbagai laporan tertulis yang bersifat resmi dari pemerintah. Dengan mengaji berbagai dokumen perencanaan dan laporan sejak tahun pertama hingga terakhir, peneliti dapat menemukan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan.

### **2.4 Metode Analisis Data**

Penelitian ini mengevaluasi capaian terhadap target yang telah ditentukan dalam dokumen RPJMD Prov. Sulbar Tahun 2017 - 2022. Target tersebut merupakan nilai kuantitas yang ditentukan berdasarkan indikator kinerja program. Adapun program dan indikator kinerja yang dievaluasi dalam penelitian ini terdiri dari masing – masing 43 (empat puluh tiga) Program dan indikator kinerja yang

tersebar pada 8 (delapan) perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.** Daftar program dan indikator kinerja yang dievaluasi

No.	Program pada RPJMD	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase tingkat kondisi mantap jalan provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang	
3	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		
4	Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan		
5	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan		
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan		
7	Program Peningkatan Infrastruktur Kawasan Perkantoran		
8	Program Pengembangan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase ketersediaan layanan informasi jasa konstruksi tingkat provinsi	
9	Program Pembinaan, Pengembangan, dan Kerjasama Pengawasan Uji Mutu dan Standarisasi Konstruksi Bangunan	Persentase paket pekerjaan konstruksi yang melakukan pengujian laboratorium setiap tahunnya	
10	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase irigasi kewenangan pemerintah provinsi dalam kondisi baik	
11	Program Pengendalian Banjir	Terbangunnya konstruksi pengaman pantai dan sungai	
12	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase masyarakat yang memperoleh akses air bersih dan akses jaringan air limbah	



No.	Program pada RPJMD	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab
13	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Terbangunnya saluran drainase kewenangan Pemerintah Provinsi	
14	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase tingkat penurunan luas daerah genangan air di kawasan strategis provinsi	
15	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW Provinsi	
16	Program Pemanfaatan Ruang		
17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		
18	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase penurunan tingkat kecelakaan lalu lintas	Dinas Perhubungan
19	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal pertahun	
20	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah sarana dan prasarana perhubungan	
21	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Transportasi	Pemasangan rambu-rambu/ pemasangan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan	
22	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas		
23	Program peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah arus penumpang	
24	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor		
25	Program peningkatan keselamatan transportasi	Jumlah pengusaha yang mengikuti kompetensi keselamatan transportasi	
26	Program Pengendalian Lalu Lintas	Frekuensi kegiatan penertiban pengendalian lalu lintas	
27	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Persentase peningkatan penggunaan energi baru terbarukan	
28	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Promosi	Persentase regulasi, rekomendasi pengelolaan SDM dan data dan	

No.	Program pada RPJMD	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab
	Potensi Energi dan Sumber Daya Mineral	informasi potensi ESDM dapat diakses melalui media online	
29	Program pengembangan perusahaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan konservasi energi	Rasio desa yang terlayani listrik Jumlah rumah tangga pemakai listrik PLTMH, PLTS, PLTB (KK) Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan pengembangan energi baru terbarukan	
30	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Persentase rumah tangga miskin (RTM) yang teraliri listrik	
31	Program perusahaan, pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Jumlah rumah tangga sasaran (masyarakat tidak mampu) yang mendapatkan bantuan listrik perdesaan Dokumen pemetaan (desa belum berlistrik) dan pengembangan ketenagalistrikan	
32	Program pengelolaan air tanah, survey dan pemetaan sumber daya geologi, air tanah, tata lingkungan, mineral dan batubara	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih dari air tanah (sumur bor) Dokumen hasil evaluasi pemanfaatan air tanah dan data informasi potensi sumber daya geologi	
33	Program perusahaan, pembinaan dan pengawasan bidang mineral dan batubara	Jumlah usaha pertambangan (IUP) yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, finansial dan lingkungan ( <i>clear and clean</i> ) Persentase pertambangan tanpa izin Luas penambangan liar yang ditertibkan	
34	Program peningkatan pelayanan jasa laboratorium dan pembuatan peta dan SIG	Jumlah pendapatan dari sektor jasa laboratorium dan pembuatan peta dan SIG	
35	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%) Rasio rumah layak huni (%)	Dinas Perumahan dan Permukiman

No.	Program pada RPJMD	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab
36	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase kawasan permukiman yang ditingkatkan prasarana, sarana dan utilitas umum	
37	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (%)	
		Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	
38	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Persentase permukiman yang tertata	
39	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	
40	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Jumlah data dan informasi serta dokumen perencanaan sumberdaya alam	Bappeda
41	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Luas lahan difasilitasi untuk dibebaskan	Biro Tata Pemerintahan
42	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase peningkatan Lembaga masyarakat/kelembagaan peduli lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
43	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang difasilitasi penempatannya	Dinas Transmigrasi
	<b>43 Program</b>	<b>43 Indikator</b>	<b>8 OPD</b>

Dalam melakukan analisis capaian, diperlukan data target dan data realisasi yang akan disandingkan untuk dievaluasi sesuai format dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017. Kedua data tersebut dapat diperoleh dari dokumen yang tersedia di unit organisasi terkait, seperti data target tahunan dapat diambil dari dokumen RPJMD Prov. Sulbar Tahun 2017 – 2022, sedangkan data realisasi tahunan dapat disesuaikan dengan LKPJ Gubernur maupun LKjIP untuk tahun 2018 – 2021 yang telah tersedia. Kemudian data – data tersebut dikompilasi ke dalam tabel sesuai dengan format dan penjelasan yang ada dalam lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017 (halaman 265) sebagai berikut.

**Tabel 3.** Evaluasi terhadap hasil RPJMD

No	Tujuan/ Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir periode perencanaan	Target RPJMD Tahun Ke -					Capaian Target RPJMD Tahun Ke-					Tingkat Capaian Target RPJMD Provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Tahun Ke- (%)					Capaian pada akhir tahun perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Rata-rata capaian kinerja (%)																					
Predikat kinerja																					

Adapun tata cara pengisian tabel tersebut adalah:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan tujuan/sasaran/program RPJMD;

Kolom (3) diisi dengan indikator tujuan/sasaran/program RPJMD;

Kolom (4) diisi dengan capaian indikator pada awal periode perencanaan;

Kolom (5) diisi dengan target indikator pada akhir periode perencanaan;

Kolom (6) s.d. (10) diisi dengan target sasaran pokok tiap periode perencanaan;

Kolom (11) s.d. (15) diisi dengan capaian sasaran pokok tiap periode perencanaan;

Kolom (16) s.d. (20) diisi dengan tingkat capaian berdasarkan perhitungan: membandingkan antara capaian tiap periode dengan target tiap periode perencanaan;

Kolom (21) diisi dengan capaian pada akhir periode perencanaan; dan

Kolom (22) diisi dengan membandingkan antara capaian (kolom 21) dan target (kolom 5).

Selanjutnya nilai tingkat capaian kinerja pada masing – masing program dibedakan berdasarkan kategori berikut.

**Tabel 4.** Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Nilai Relisasi Kinerja	Penilaian Realisasi Kinerja
1.	> 100%	Melampaui target
2.	= 100%	Mencapai target
3.	< 100%	Tidak mencapai target

Setelah mengetahui dan menganalisis hasil capaian kinerja terhadap implementasi program, maka dilakukan kajian kepustakaan untuk menemukan dan menganalisis faktor – faktor yang memengaruhi capaian kinerja dalam implementasi RPJMD tersebut. Pengkajian dilakukan terhadap dokumen laporan – laporan yang dikeluarkan resmi oleh pemerintah provinsi Sulawesi Barat.